

SOSIAL-EKOLOGIS DALAM PEMBENTUKAN ENTITAS AGRIBISNIS KEMITRAAN DI TENGAH STRUKTUR SOSIAL KEMASYARAKATAN HETEROGEN

Herda Sabriyah Dara Kospa¹⁾, Fachrurrozie Sjarkowi²⁾, Maryanah Hamzah³⁾

¹⁾Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indo Global Mandiri

²⁾³⁾Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129

Email : darabantet@rocketmail.com¹⁾, fachsyar@yahoo.com²⁾, info@unsri.ac.id³⁾

ABSTRACT

The scarcity of land in establishing agro industry causes the need of productive agribusiness partnership. The aim of this study are to: (1) identify social stratifications and social differentiations as determinant to establish agribusiness partnership entity, (2) describe social ecology characteristics as determinant to establish agribusiness partnership entity, (3) compare pre-plasma income and post-plasma expectation income. The research was conducted in Bandar Jaya and Umpam Villages Lengkiti Sub District of OKU Induk, South Sumatra Province. The purposive sampling method was used of which the farmers of yearly crop were chosen. The result of the social structure analysis showed that from the average income, education level and culture acceptance, the farmers would be responsive to the partnership. Subsequently, the analysis of socio-ecological characteristics of both villages indicated that the farmer's of both villages would be more responsive to the partnership. The present value of revenues in both village lower than palm oil revenue expectation of partnership with PT AP. The results of this study indicated that Ho hypothesis is accepted, which means the farmers' income of pre-plasma (slab) in both villages less than the income of farmers expectations of post-plasma (oil palm), so that the partnership would be easily established.

Keywords : *Socio-ecology; Agribusiness Partnership; Socio-culture*

1. Pendahuluan

nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan warga serta kemakmuran daerah. Dari pada sekedar bertumpu pada ekonomi produksi dan ekspor bahan mentah yang dihasilkan usahatani rakyat, cara yang lebih produktif dan bernilai guna dapat diwujudkan melalui peran agroindustri. Proses cipta nilai tambah bukan sekedar karena kemampuan agroindustri mentransformasi bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, tetapi juga berkat kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi mikro lewat adanya *Keseimbangan Kapasitas Agribisnis Hulu-Hilir* untuk suatu komoditi pertanian yang biasanya dalam bentuk aslinya mudah rusak (Sjarkowi, 2010)

Tentu tidak mudah lagi untuk mendapatkan bentang lahan yang sesuai dengan kebutuhan skala-usaha yang pas dengan kehendak rencana kapasitas terpasang agroindustri hilirnya. Penduduk sudah berada di mana-mana, bahkan sudah merambah kawasan lindung apalagi kawasan penyangga dan kawasan APL (Area Peruntukan Lain). Untuk itu, jelas ada realita lapangan yang mengharuskan setiap calon investor agar bermitra dengan masyarakat yang sedang menguasai lahan.

Namun, pola kemitraan tersebut hanya akan menjadi penghias jika pola kemitraan ini bersifat kontra produktif dan semi produktif. Pola kemitraan kontra produktif akan terjadi apabila perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Sedangkan Pola kemitraan semi produktif terjadi di mana pemerintah dan komunitas atau masyarakat

dianggap sebagai objek dan masalah di luar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat. Terlebih ini juga dapat memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja, misalnya pemogokan oleh karyawan, masyarakat berdemo dan pengrusakan (Media Pertanian, 2003).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kartodihardjo dan Supriono (2000), semua perkebunan sawit di Sumatra Selatan yang berjumlah 81 perkebunan menghadapi konflik pertanahan dengan masyarakat lokal. Hingga Januari 2008, pihak Sawit Watch mencatat bahwa sedang berlangsung 513 konflik antara masyarakat dengan perkebunan sawit di Indonesia yang melibatkan 135 perusahaan milik negara maupun swasta. Konflik tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konflik tanah hingga konflik lingkungan.

Media Pertanian (2003) memaparkan bahwa dengan banyaknya konflik tersebut di lapangan, dibutuhkan pola yang tepat yang dapat mensinergikan semua pihak yang terlibat dalam kemitraan yaitu pola kemitraan yang bersifat produktif. Pola kemitraan Produktif ini menempatkan mitra sebagai subjek dalam paradigma *common interests*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dorongan positif bagi

perusahaan. Berdasarkan studi Sjarkowi (2010) dalam jurnalnya yang berjudul *Genuine Social Acceptance of Technical Innovation to Improve Profitability for Out Growers Associated with a Forestry Company in South Sumatera, Indonesia* menyatakan bahwa terdapat empat pertimbangan sosiologis dalam rangka pengembangan kemitraan dengan warga masyarakat setempat yang terdiri dari sosial-psikologi, sosial-budaya, sosial-ekologi, dan sosial-ekonomi.

Dimensi sosial-ekonomis, sosial-budaya dan sosial psikologis dapat dikaji melalui pengamatan terhadap struktur sosial kemasyarakatan di wilayah calon plasma. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal atau horizontal (Bungin, 2009).

Dimensi sosial-ekologis sangat signifikan pengaruhnya terhadap keberlanjutan kemitraan agribisnis. Menurut Sjarkowi (2004) keberlanjutan ekologis adalah esensi dari semua keberlanjutan yang lain. Karena adanya keberlanjutan ekologis maka keberlanjutan ekonomis dapat lebih terjamin. Dengan pertumbuhan ekonomis yang dicapai lewat keberlanjutan ekonomis maka keberlanjutan sosial- budaya mendapatkan energinya.

Dimensi sosial-ekologis ini dapat diukur melalui perilaku ekologis masyarakat yang akan memiliki pengaruh secara ekonomi baik yang terkait dengan komoditas ataupun lingkungan hidup. Budaya petani tertentu yang merusak agro-ekosistem dengan cara tebang-tebas-bakar, mencemari sungai dan meracuni ikan akan berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian. Sebaliknya, perilaku komunal masyarakat desa berupa kearifan lokal yang terkait dengan pemanfaatan alam, pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Bagi petani calon-plasma yang berpendapatan atau berpendidikan tinggi, mereka cenderung lebih berhati-hati dan kritis dalam mengambil keputusan untuk bermitra. Petani ini cenderung menginginkan kepastian bahwa kemitraan akan memberikan pendapatan yang jauh lebih besar sehingga perlu menganalisis disparitas pendapatan antara komoditi yang ditawarkan investor dengan komoditi yang diusahakan oleh petani calon-plasma. Dengan mengetahui disparitas tersebut akan lebih meyakinkan petani untuk bergabung atau sebaliknya menolak kemitraan tersebut.

Secara umum studi ini bertujuan untuk menganalisis isyarat sosial- ekologis dalam pembentukan entitas agribisnis kemitraan di tengah struktur sosial kemasyarakatan heterogen. Secara khusus studi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh struktur sosial kemasyarakatan terhadap repon pembentukan entitas agribisnis kemitraan.

2. Menganalisis karakteristik sosial-ekologis masyarakat di suatu wilayah sebagai determinan pembentukan entitas agribisnis kemitraan.
3. Menganalisis besarnya perbedaan tingkat pendapatan usahatani petani pra-plasma dengan tingkat pendapatan harapan petani pasca-plasma di suatu wilayah.
4. Mengidentifikasi respon masyarakat di suatu wilayah terhadap rencana pembentukan kemitraan.

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu sumber referensi bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai upaya pembentukan agribisnis kemitraan yang berwawasan kerakyatan dan berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan khususnya sosial-ekologis.

1. Data dan Metodologi

Studi ini dilaksanakan di Desa Umpam dan Desa Bandar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Lokasi studi ini dipilih secara sengaja (*Purposive Sampling*) dengan pertimbangan bahwa kedua desa ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar pengembangan agroindustri atau komoditi perkebunan di Ogan Komering Ulu karena kondisi tanah yang subur dan sangat cocok untuk tanaman perkebunan serta karena potensi lahan yang tersedia masih sangat luas. Pelaksanaan pengumpulan data primer dan sekunder di lapangan serta pengolahan data studi dilakukan sejak September 2010 hingga April 2011.

Adapun metode studi yang digunakan adalah metode survei. Peneliti mengunjungi dan mengambil data mengenai fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual berupa struktur sosial dan karakteristik sosial-ekologis masyarakat di Desa Umpam dan Bandar Jaya. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kejadian dan fakta yang terjadi di lapangan yang dapat dijangkau dengan cara membuat daftar pertanyaan atau kuesioner serta wawancara secara mendalam kepada petani. Parameter yang dipakai dalam setiap peubah berdasarkan teori yang ada yaitu melalui literatur dan kajian pustaka, dilengkapi juga dengan jurnal dan hasil studi. Selanjutnya parameter tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner sebagai instrumen studi.

Penarikan contoh dalam studi ini menggunakan acak sederhana (*simple random sampling*). Dalam metode ini, semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama yaitu petani yang mengelola atau memiliki usahatani di Desa Umpam dan Bandar Jaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menyusun semua unit studi ke dalam daftar kerangka sampling, kemudian dari masing-masing desa diambil 30 kepala keluarga sebagai sampel. Sebaran populasi dan sampel dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Populasi Dan Sampel Desa Umpam Dan Bandar Jaya

No	Desa	Populasi (KK)	Sampel (KK)	Persentase (%)
1	Umpam	302	30	9,93
2	Bandar Jaya	363	30	8,26
Jumlah		665	60	18,19

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner yang ditanyakan ke tiap sampel dan dilakukan juga observasi langsung beserta wawancara langsung secara mendalam agar dapat mendeskripsikan hasil studi yang dilakukan. Sementara data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang dapat menunjang studi ini seperti kantor desa, Badan Pusat Statistik Palembang, serta studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menjawab tujuan pertama yaitu untuk mengidentifikasi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial suatu masyarakat dalam pembentukan entitas agribisnis kemitraan, Stratifikasi sosial diukur melalui tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan luas lahan, sedangkan diferensiasi sosial diukur melalui jumlah suku dan adat istiadat. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, dimana data dari hasil studi dikumpulkan, dianalisis dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi. Rumus pendapatan usahatani digunakan rumus :

Produktivitas usahatani dihitung menggunakan rumus:

$$Pv^i = Y^i / L^i \dots\dots\dots(1)$$

Biaya produksi total usaha tani dihitung menggunakan rumus (Sukirno, 2000) :

$$BT^i = BTpT^i + BVT^i \dots\dots\dots(2)$$

Penerimaan usahatani dihitung menggunakan rumus (Mubyarto, 1996) :

$$PNT^i = Y^i \cdot Hy^i \dots\dots\dots(3)$$

Pendapatan usahatani dan luar usahatani dihitung menggunakan rumus (Daniel, 2002) :

$$\pi^i = \sum_{k=1}^i PNT - \sum_{k=1}^i BT \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

Pv^i = Produktivitas (Kg/Lg)

$BTpT^i$ = Biaya tetap total (Rp/ha/thn)

BVT^i = Biaya variabel total (Rp/ha/thn)

BT^i = Biaya produksi total (Rp/ thn)

PNT^i = Total penerimaan (Rp/Kg)

Y^i = Produksi usahatani (Kg)

L^i = Luas lahan garapan (ha)

Untuk menganalisis karakteristik sosial-ekologis di suatu wilayah sebagai determinan pembentukan entitas agribisnis kemitraan, diukur ke dalam bentuk skor. Selanjutnya skor tersebut digolongkan menurut interval kelas. Untuk mengidentifikasi perilaku ekologis ini, responden diajukan masing-masing ke dalam lima pertanyaan untuk tiap indikator. Indikator yang digunakan adalah kebiasaan lalai lingkungan, kearifan lokal terhadap lingkungan dan kemampuan & karya inovatif pro-lingkungan di masing-masing desa tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisis dengan teknik penskalaan likert dengan empat pilihan jawaban lalu diuji dengan analisis validitas dan reabilitas menggunakan SPSS 17.0. Kategori pilihan jawaban dengan skor tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah sangat setuju (skor 4), setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2) dan sangat tidak setuju (skor 1). Semakin rendah skor maka perilaku tergolong ke dalam kriteria negatif, dan sebaliknya semakin tinggi skor maka perilaku tergolong ke dalam kriteria positif.

Rumus yang digunakan untuk menentukan karakteristik sosial-ekologis adalah sebagai berikut:

$$NR = NST - NSR \dots\dots\dots(5)$$

$$PI = NR : JIK \dots\dots\dots(6)$$

Dimana :

NR = Nilai range

NST = Nilai skor tertinggi

NSR = Nilai skor terendah

PI = Panjang interval kelas

JIK = Jumlah interval kelas

Interval kelas untuk mengukur skor total tersebut dapat digunakan rumus :

$$NST = 60 [3 \text{ indikator} \times 5 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (4)]$$

$$NSR = 15 [3 \text{ indikator} \times 5 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (1)]$$

$$JIK = 2$$

Interval kelas untuk mengukur indikator tersebut dapat digunakan rumus :

$$NST = 20 [5 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (4)]$$

$$NSR = 5 [5 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (1)]$$

$$JIK = 2$$

Skor untuk interval kelas per pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$NST = 4 [1 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (4)]$$

$$NSR = 1 [1 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (1)]$$

$$JIK = 2$$

Tabel 2. Nilai Interval Kelas Karakteristik Sosial Ekologis

Nilai Interval Kelas (Skor Total)	Nilai Interval Kelas (Per indikator)	Nilai Interval Kelas (Per pertanyaan)	Kriteria
15,0 <x≤ 37,5	5,0 <x≤ 12,50	1,0 <x≤ 2,5	Negatif
37,5 <x≤ 60,0	12,5 <x≤ 20,0	2,5 <x≤ 4,0	Positif

Menjawab tujuan ketiga yaitu menganalisis besarnya perbedaan tingkat pendapatan usahatani antara petani pra-plasma dan petani pasca-plasma yaitu dengan

menggunakan analisis evaluasi proyek. Tingkat pendapatan harapan petani pasca-plasma diperoleh menggunakan data sekunder berdasarkan keterangan perusahaan contoh, sedangkan tingkat pendapatan usahatani petani pra-plasma dihitung menggunakan total pendapatan usahatani. Keduanya dianalisis dengan proyeksi selama umur ekonomis dari masing-masing komoditi menggunakan analisis *Net Present Value* (NPV).

Menjawab tujuan ke empat yaitu untuk mengetahui respon masyarakat Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam terhadap agribisnis (sawit) kemitraan diukur dengan skor melalui teknik penskalaan likert lalu diuji dengan analisis validitas dan reabilitas menggunakan SPSS 17,0. Respon diukur berdasarkan sepuluh pertanyaan dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Semakin tinggi skor maka respon masyarakat semakin tanggap terhadap kemitraan.

Interval kelas untuk mengukur indikator tersebut dapat digunakan rumus :

$$NST = 40 [10 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (4)]$$

$$NSR = 10 [10 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (1)]$$

$$JIK = 4$$

Skor untuk interval kelas per pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$NST = 4 [1 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (4)]$$

$$NSR = 1 [1 \text{ pertanyaan} \times \text{ bobot pertanyaan} (1)]$$

$$JIK = 4$$

Tabel 3. Nilai Interval Kelas Respon Masyarakat Terhadap Pembentukan Sawit Kemitraan

No	Nilai Interval Kelas (Skor Total)	Nilai Interval Kelas (Per pertanyaan)	Kriteria
1	10,00<x≤ 17,50	1,00<x≤ 1,75	Sangat Tidak Setuju
2	17,51<x≤ 25,00	1,76 <x≤ 2,50	Tidak Setuju
3	25,01<x≤ 32,50	2,51<x≤ 3,25	Setuju
4	32,51<x≤ 40,00	3,26 <x≤ 4,00	Sangat Setuju

2. Pembahasan

a) Struktur Sosial Kemasyarakatan di Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam

Struktur sosial kemasyarakatan ini dibagi menjadi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial diukur melalui tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan luas lahan, sedangkan diferensiasi sosial diukur melalui jumlah suku dan adat istiadat.

1) Pendapatan

Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani di kedua desa tergolong ke dalam pendapatan rendah. Kebanyakan responden pada golongan ini merupakan penduduk pendatang sehingga sulit mendapatkan lahan pertanian akibat harga lahan yang semakin tinggi. Selain itu, mereka umumnya tidak mampu untuk melakukan perawatan intensif dengan

pemberian pupuk atau pestisida secara tepat dan teratur, apalagi melakukan peremajaan tanaman yang telah berumur tua atau tidak produktif lagi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), struktur pendapatan dikelompokkan menjadi tiga yakni kriteria rendah dengan pendapatan lebih rendah dari Rp 83.000.000 per tahun, kriteria sedang Rp 83.000.000 – Rp 167.000.000 per tahun dan kriteria tinggi dengan pendapatan lebih tinggi dari Rp 167.000.000 per tahun.

Tabel 4. Struktur Pendapatan Total Masyarakat Berdasarkan Standar Bps, 2010 (Rp/Th)

No	Pendapatan Total (Rp/th)	Rata-rata		
		B. Jaya (Jiwa)	Umpam (Jiwa)	(%)
1	Rendah (< 83 Juta)	29	29	96,67
2	Sedang (83 Juta – 167 Juta)	1	1	3,33
3	Tinggi (> 167 Juta)	0	0	0
Total		30	60	100

Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik tersebut, petani di kedua desa telah dikelompokkan menjadi tiga kriteria pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat jelas bahwa rata-rata petani di Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam tergolong ke dalam pendapatan kriteria rendah. Dengan adanya fakta tersebut, akan lebih mudah bagi investor untuk mempengaruhi masyarakat setempat karena menurut Mardikanto (2009) bahwa pendapatan yang rendah akan mengganggu semangat masyarakat petani untuk berproduksi sebagai akibat dari rendahnya pendapatan. Dalam keadaan yang paling ekstrim, masyarakat petani akan meninggalkan atau mengubah usahanya ke bentuk usaha lain. Hal ini mengindikasikan bahwa petani akan lebih mudah untuk bermitra dengan calon investor.

2) Pendidikan

Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan formal responden di kedua desa berada pada kategori rendah. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di kedua desa ini. Keadaan ekonomi keluarga responden yang rendah dan jarak tempuh sekolah lanjutan yang jauh sehingga memerlukan dana yang besar menyebabkan banyak responden yang tidak sampai pada sekolah lanjutan. Selain itu, faktor kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan yang masih minim menyebabkan banyak keluarga petani yang hanya mengikuti jejak orang tua yang secara turun menurun berprofesi sebagai petani.

Menurut Bappenas (2010) rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan

sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki pendapatan yang rendah karena rendahnya tingkat inovasi. Ini mengindikasikan dengan rata-rata pendidikan rendah, petani di kedua desa akan mudah menerima kemitraan.

3) *Luas lahan*

Rata-rata petani di kedua Desa memiliki luasan lahan yang sempit yaitu kurang dari 2 ha. Terutama di Desa Umpam, 70 persen petani memiliki lahan yang sempit karena di Desa ini lebih banyak penduduk datangan sehingga sulit bagi mereka memperoleh lahan untuk bertani yang luas karena harga lahan yang semakin tinggi. Oleh karena lahan yang dimiliki petani di Desa Umpam ini sempit, maka kebanyakan mereka memiliki usaha sampingan menjadi buruh tani atau menyewa lahan.

Merujuk dari studi Purnaningsih (2006), pola kemitraan cenderung diadopsi oleh petani yang memiliki luasan lahan sempit karena dengan lahan sempit petani membuat keputusan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran khususnya, agar konsentrasi petani terfokus untuk proses produksi. Peningkatan luas lahan petani akan membuat petani berusaha untuk mencari peluang sendiri, mandiri, keluar dari pola kemitraan. Ini artinya dengan rata-rata luasan lahan sempit, petani di Desa Bandar Jaya dan Umpam akan mudah menerima kemitraan.

4) *Suku*

Mayoritas atau lebih dari 50 persen penduduk di Desa Bandar Jaya dan di Desa Umpam berasal dari suku Ogan dan minoritas warganya berasal dari suku Daya, Rambang, Komerling, dan Jawa. Pada studi ini, jumlah responden yang berasal dari suku Ogan dari Desa Bandar Jaya adalah sebesar 83,33 persen dan sisanya berasal dari suku Jawa dan Komerling. Begitupula dengan responden dari Desa Umpam, sebesar 86,67 persen berasal suku Ogan dan sisanya berasal dari suku Jawa dan Rambang. Walaupun terdiri dari banyak suku, kehidupan masing-masing suku dari kedua desa tampak harmonis dan tidak terdapat lagi pengelompokan-pengelompokan atau diskriminasi. Tidak pernah terjadi konflik antar suku ataupun antar warga di kedua desa tersebut. Masyarakat dari semua suku sudah bercampur baur dan tidak terdapat kelompok-kelompok yang dapat memicu konflik.

Konflik-konflik antar suku yang sering terjadi di suatu wilayah dapat menghambat berjalannya kemitraan agribisnis bahkan menjadi salah satu penyebab kegagalan kemitraan selama ini. Dengan harmonisnya kerukunan antar suku baik di Desa Bandar Jaya maupun di Desa Umpam akan berdampak sangat positif bagi pembentukan kemitraan agribisnis di kedua desa tersebut.

Penerimaan warga pendatang oleh kedua desa sangat baik. Terlihat dari persentase responden yang menjawab

sangat menerima warga pendatang dari suku atau daerah manapun. Hal ini tercermin secara langsung dari kehidupan antar warga dari kedua desa. Tidak terdapat pengelompokan-pengelompokan atau diskriminasi antar suku. Suku-suku yang ada, baik suku pribumi maupun pendatang, telah hidup berbaur dan berdampingan dengan harmonis. Budaya pernikahan hanya dengan sesama suku dan sederajat tidak ada lagi di desa ini. Semua suku yang ada telah berbaur dan hidup berdampingan, bahkan sangat banyak suku asli yang menikah dengan suku lain, dengan suku Jawa misalnya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi keberlangsungan kemitraan karena akan banyak warga pendatang terutama karyawan perusahaan yang akan direkrut dari luar desa sehingga konflik tidak mudah terjadi.

b) Perilaku Ekologis di Desa Bandar Jaya dan Umpam sebagai Determinan Pembentukan Entitas Agribisnis Kemitraan

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara mendalam di lapangan, perilaku ekologis masyarakat di Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5 Skor Rata-rata Perilaku Ekologis Masyarakat

No	Uraian	Desa Bandar Jaya		Desa Umpam	
		Skor	Kriteria	Skor	Kriteria
1	Kebiasaan Berwawasan Lingkungan	6,4	Negatif	5,77	Negatif
2	Kearifan Lokal Pro-lingkungan	6,1	Negatif	5,23	Negatif
3	Karya dan Kemampuan Inovatif	5,73	Negatif	5,23	Negatif
Jumlah		18,2	Negatif	16,2	Negatif

Berdasarkan Tabel 5 rata-rata perilaku ekologis masyarakat di Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam tergolong ke dalam kriteria negatif. Berdasarkan studi di lapangan, masyarakat yang tergolong ke dalam perilaku negatif akan lebih tanggap terhadap kemitraan. Hal ini terjadi karena perilaku yang selama ini ada di masyarakat tidak mendukung bahkan tidak memelihara daya dukung terhadap lingkungan yang akan menjadi penentu keberlanjutan usahatani. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya produktivitas usahatani yang mereka usahakan sehingga pendapatan yang akan diperoleh pun semakin lama cenderung semakin rendah. Inilah yang menyebabkan masyarakat yang tergolong ke dalam perilaku ekologis negatif akan lebih mudah untuk diajak bermitra.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku ekologis ini yaitu kebiasaan lalai lingkungan,

kearifan lokal pro-lingkungan, dan kemampuan & karya inovatif yang ada di kedua desa yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1) Kebiasaan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan hasil studi di lapangan, kegiatan pertanian yang dilakukan oleh kedua desa masih bersifat sangat tradisional, hampir tidak ada teknologi yang digunakan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap semua responden di kedua desa, riwayat pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian masih bersifat tebang-tebas-bakar. Pembukaan lahan diakui oleh petani dapat mengefisienkan tenaga dan biaya produksi. Selain itu, petani merasa dengan membakar lahan areal pertanian dapat membuat tanah pertanian menjadi lebih subur.

Rata-rata Kegiatan Mandi-Cuci-Kakus (MCK) baik di Desa Umpam maupun di Desa Bandar Jaya masih sangat bergantung pada sungai. Sebanyak 70 persen responden dari Desa Bandar Jaya dan 76,67 persen warga desa Umpam masih melakukan MCK di sungai atau semak. Hal ini terjadi karena fasilitas MCK umum yang telah dibangun oleh pemerintah berjumlah terbatas, relatif jauh dari kediaman masyarakat dan tidak dapat difungsikan karena tidak ada ketersediaan air saat musim kemarau.

Ditinjau berdasarkan indikator perlakuan terhadap sampah rumah tangga, masyarakat dari kedua desa pada umumnya membuang sampah ke dalam hutan. Belum ada pemanfaatan khusus terhadap sampah domestik ini. Petani di kedua desa tersebut rata-rata belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan sampah organik untuk menghemat biaya produksi sekaligus mengurangi pencemaran akibat pemakaian bahan baku kimia. Dengan adanya program *Community Development* (CD) yang difasilitasi oleh investor, masyarakat diharapkan dapat memiliki wadah untuk menambah pengetahuan usahatani yang sifatnya pro terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

2) Kearifan Lokal Pro-lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, di kedua desa tidak terdapat sanksi atau penghargaan adat yang menunjang kelestarian lingkungan. Karena kemajemukan suku dan perkembangan zaman, kearifan lokal tidak tampak lagi di kedua desa. Petani cenderung hanya bertumpu pada hasil dari tanaman karet. Petani enggan memiliki ternak karena kasus pencurian yang kerap terjadi. Selain itu, sudah jarang petani yang memanfaatkan pekarangan atau sumber daya alam lain di sekitar tempat tinggal. Semestinya, dengan kegiatan petani menanam sayuran atau beternak selain dapat meningkatkan pendapatan, juga dapat berkontribusi untuk keberlanjutan ekologis, contohnya dengan pemanfaatan tanaman sela kacang-kacangan untuk

kesuburan lahan dan kotoran ternak yang dapat digunakan untuk pupuk organik.

3) Kemampuan dan Karya Inovatif

Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan produksi pertanian di kedua desa belum mengindikasikan adanya suatu kegiatan produksi dan konsumsi yang bersifat inovatif. Kegiatan pertanian yang dilakukan masih tradisional. Inovasi hanya terlihat dari penggunaan bibit klon karet yang baru digunakan sejak lima tahun yang lalu. Sebanyak 40 persen petani Desa Bandar Jaya dan 20 persen petani Desa Umpam menggunakan bibit klon untuk tanaman yang belum menghasilkan. Umumnya petani yang mendapatkan bibit unggul hasil klon adalah petani yang tergolong ke dalam kelompok tani di desa tersebut.

c) Perbandingan Pendapatan Usahatani Petani Pra-Plasma dengan Pendapatan Harapan Petani Pasca-Plasma.

Pendapatan petani pra-plasma dalam studi ini menggunakan nilai kini pendapatan tanaman utama di kedua desa yaitu komoditi karet yang umumnya ditanam polikultur dengan kopi dan padi ladang, sedangkan pendapatan harapan petani pasca-plasma diperoleh dari data sekunder nilai kini pendapatan sawit selama 25 tahun Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, diperoleh pendapatan harapan sawit. Sedangkan NPV komoditi karet polikultur Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam.

Berdasarkan hasil nilai NPV antara tanaman karet polikultur dan kelapa sawit, diketahui bahwa berdasarkan perhitungan secara finansial, rata-rata NPV tanaman karet polikultur petani pra-plasma adalah sebesar Rp 1.045.011,80 ha per tahun. Sedangkan, NPV tanaman kelapa sawit yang ditawarkan investor yakni sebesar Rp 1.315.913,34 per hektar per tahun. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Secara finansial, tanaman kelapa sawit lebih menguntungkan daripada penanaman karet polikultur yang diusahakan petani saat ini sebab tanaman kelapa sawit memberikan total NPV lebih besar jika dibandingkan dengan total NPV karet polikultur.

Perbedaan pendapatan disebabkan oleh perbedaan produksi dan biaya produksi. Rata-rata produksi tanaman kelapa sawit per tahunnya lebih tinggi daripada produksi tanaman karet polikultur karena cara penanaman dan perawatan kelapa sawit yang ditawarkan pihak investor dilakukan secara intensif serta menggunakan berbagai inovasi dan teknologi, sehingga produksi yang dihasilkan lebih tinggi. Kegiatan sebelum penanaman sawit yaitu pembongkaran atau penebangan habis seluruh tanaman yang tumbuh (*land clearing*) dilakukan dengan pengolahan lahan tanpa bakar (*zero burning*) yaitu dengan alat berat. Begitupula dengan kegiatan pemupukan dan pemberian pestisida akan

dilakukan dengan sangat intensif dan sesuai standar pemberian yang dianjurkan dinas perkebunan.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan entitas agribisnis akan mudah terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan yang akan diterima masyarakat lebih besar dibandingkan dengan tanaman karet yang diusahakan saat ini. Sesuai asumsi, merujuk dari Mubyarto (1989) dalam Asim (2001), akibat rendahnya pendapatan sekarang, dalam keadaan yang paling ekstrim petani akan meninggalkan atau merubah usahanya ke bentuk usaha lain sehingga petani lebih mudah untuk diajak bermitra. Selain itu, ciri kehidupan masyarakat agraris di pedesaan nusantara yang sekarang ini sudah semakin konsumtif, sementara tidak semua unsur warga masyarakat mempunyai sumber pendapatan harian, mingguan serta bulanan yang terjamin.

d) Respon Masyarakat Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam Terhadap Sawit Kemitraan

Respon masyarakat terhadap sawit kemitraan diukur dengan menggunakan penskalaan Likert dengan empat pilihan jawaban yang dicerminkan ke dalam sepuluh pertanyaan. Semakin tinggi skor maka respon kemitraan semakin baik dan sebaliknya semakin kecil skor maka respon petani semakin negatif terhadap kemitraan kelapa sawit. Adapun hasil pengelompokan masyarakat berdasarkan responnya terhadap sawit kemitraan dapat dilihat pada Tabel 6. sebagai berikut.

Tabel 6. Respon Masyarakat Terhadap Kemitraan Sawit

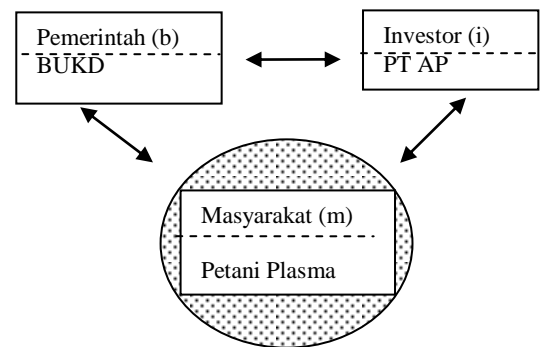
No	Respon Terhadap Kemitraan	Desa Bandar Jaya		Desa Umpam	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	Sangat Setuju	17	56,6	23	76,6
2	Setuju	4	13,3	3	10,0
3	Tidak Setuju	7	23,3	2	6,67
4	Sangat Tidak Setuju	2	6,67	2	6,67
Jumlah		30	100	30	100

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi di kedua desa, rata-rata respon petani sangat setuju terhadap terjalannya kemitraan kelapa sawit dengan investor. Petani di kedua desa sangat menginginkan desa mereka menjadi desa yang jauh lebih makmur dan menjadi desa yang maju. Dengan adanya kemitraan tersebut, petani mengharapkan meningkatnya pendapatan dan bertambahnya lapangan pekerjaan. Selain itu, petani mengharapkan perbaikan akses jalan dan fasilitas umum lainnya yang selama ini masih tertunda agar dapat terealisasi dengan masuknya investor ke desa mereka.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh struktur sosial kemasyarakatan terhadap respon petani dalam bermitra menggunakan analisis chi-kuadrat diperoleh pengaruh yang signifikan antara struktur pendapatan dan luas lahan usahatani terhadap respon petani untuk bermitra. Petani yang memiliki pendapatan yang rendah dan luas lahan yang sempit lebih responsif terhadap kemitraan karena mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi dari usaha sebelumnya. Dan sebaliknya, petani yang memiliki pendapatan tinggi dan luasan lahan usahatani yang besar cenderung tidak responsif terhadap kemitraan karena merasa pendapatan yang telah ia peroleh melalui komoditinya sekarang telah mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, faktor kehati-hatian karena adanya pengalaman dari desa lain yang mengalami kegagalan dalam bermitra dan keinginan untuk memperoleh ganti rugi yang adil menyebabkan petani ini cenderung ragu-ragu bahkan menolak adanya kemitraan agribisnis.

Berdasarkan hasil studi terhadap respon sawit kemitraan di Desa Bandar Jaya dan Desa Umpam, serta hasil perhitungan pendapatan komoditi pra-plasma dan pendapatan harapan komoditi pasca-plasma, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani pra-plasma lebih kecil dari pendapatan petani pasca-plasma (sawit) dan respon masyarakat di kedua desa terhadap sawit kemitraan tergolong sangat setuju. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama atau Ho diterima, yang artinya pendapatan petani pra-plasma lebih kecil dari pendapatan harapan petani pasca-plasma (sawit) sehingga kemitraan akan mudah terjadi. Dapat dirumuskan peran para pelaku agribisnis kemitraan yaitu masyarakat, investor dan pemerintah agar dapat bersinergi sehingga kemitraan akan berjalan mulus yang diterangkan melalui Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Peran dan fungsi pokok pemerintah, investor, dan masyarakat dalam pembentukan entitas agribisnis kemitraan (Sjarkowi, 2010).

Dimana:

- A_{i-m} : Memberikan layanan manajemen standar dan memberikan pinjaman modal
- A_{m-i} : Memberikan komitmen penggunaan lahan menyertai pertanaman investor
- B_{b-m} : Menjadi pengelola kepentingan dan peran-serta petani plasma

B_{m-b} : Menyalurkan aspirasi dan keluhan kepada lembaga untuk diperjuangkan

C_{b-i} : Memusyawarahkan dengan adil setiap hal ihwal yang datang dari salah satu pihak

C_{i-b} : Menyalurkan aspirasi perusahaan untuk disampaikan kepada plasma dan masyarakat

Berdasarkan hasil studi, kajian kepustakaan dan pemetaan kondisi sistem agribisnis kemitraan, investor sebagai penanam modal harus memberikan layanan manajemen standar dan memberikan pinjaman modal kepada petani. Petani sebaliknya memberikan komitmen penggunaan lahan dengan jaminan produksi tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai pembina, pengatur dan pengawas beroperasinya sistem agribisnis kemitraan. Melalui peran BUKD (Badan Usaha Kemitraan Daerah), pemerintah setempat dapat menjadi pengelola kepentingan dan peran-serta petani plasma dengan menyalurkan aspirasi dan keluhan kepada lembaga untuk diperjuangkan, serta menyalurkan aspirasi perusahaan untuk disampaikan kepada petani plasma dan masyarakat.

Berdasarkan kajian sosial-ekologis masyarakat, selama menunggu panen kelapa sawit, petani-plasma hendaknya dilatih agar dapat memperoleh pendapatan harian, mingguan, dan bulanan. Konsep ini pada hakikatnya berdasarkan pada kearifan lokal yang terdapat di daerah setempat, sehingga apabila kearifan lokal ini telah hilang maka diperlukan sosialisasi untuk menumbuhkan kearifan lokal tersebut. Konsep yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan konsep Agribisnis Trisula.

Istilah Trisula bermakna 3 ujung tombak dan secara skematis, dapat dicontohkan seperti ekologi. Kelebihan pola usaha Trisula yaitu : (1) Secara teknis efisien (Zero Emission Acitivity), (2) secara ekonomis efektif (pendapatan: harian, mingguan, bulanan), (3) dari segi pengangguran sosial pola itu menawarkan kegiatan menyibukkan masyarakat dan angkatan kerjanya. Pendapatan harian didapat dari bertanam sayur cepat, pendapatan mingguan dari penjualan ikan lele, dan pendapatan bulanan diperoleh dari penjualan kambing atau kelinci bebek.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. 2010. *Sumatera Selatan dalam Angka*. (online) (<http://www.sumsel.bps.go.id> diakses pada 8 Agustus 2010).
- [2] Bungin, B. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [3] Daniel, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Akasara, Bandung.
- [4] Kartodihardjo, H. dan Agus Supriono. 2000. *Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam : Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*. CIFO, Bogor.

- [5] Mardikanto, T. 2009. *Membangun Pertanian Modern*. Lembaga Pengembang Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNSPress), Jawa Tengah.
- [6] Media Pertanian. 2003. *Pola Kemitraan Alternatif Andalan Sektor Agribisnis*. (Online). (<http://www.situshijau.co.id/tulisan.p>, diakses 8 Agustus 2010).
- [7] Mubyarto. 1996. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- [8] Purnaningsih, N. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran di Jawa Barat*. Jurnal Penyuluhan ITB, Bogor.
- [9] Sjarkowi, F. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Baldad Grafiti Press, Palembang.
- [10] _____. 2010. *Manajemen Pembangunan Agribisnis*. Baldad Grafiti Press, Palembang.
- [11] _____. 2010. *Genuine Social Acceptance of Technical Innovation to Improve Profitability for Out Growers Associated with a Forestry Company in South Sumatera, Indonesia*. Baldad Grafiti Press, Palembang.